EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15218

Analisis Tata Kelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan Pengaruhnya Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor

Arif Fadilla[1*], Gamal Sinurat[2] dan Jayadin[3]
[1,2,3] Program Doktoral Program Studi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Perdesaan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Indonesia.
Jl. Agatis Kampus IPB Darmaga, Bogor, Babakan, Dramaga, Bogor Regency, West Java 16680
*e-mail: fadilaarif@apps.ipb.ac.id,

Artikel Info

Received :
12 June 2023
Revised :
15 June 2023
Accepted :
30 June 2023

Kata Kunci :
Desa, Kemiskinan, Tatakelola.

Keywords:
Village, Poor, Governance.

ABSTRAK

Pembangunan nasional berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat dari indikator tingkat kemiskinan. Salah satu prioritas pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan di pedesaan adalah dengan penyaluran Dana Desa sejak dikeluarkannya UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kebijakan penyaluran Dana Desa ini sudah dimulai sejak tahun 2015 sampai saat ini dan sudah banyak penelitian terkait efektivitas Dana Desa terhadap penanggulangan Tingkat Kemiskinan. Fakta empiris yang menarik adalah Kabupaten Bogor secara geografis sangat dekat dengan Ibu Kota Negara Jakarta jumlah masyarakat miskinnya terbesar di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak Dana Desa terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Bogor, serta peran Pemerintahan Desa dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan pendekatan analisis kuantitatif desktiptif, Dana Desa berkorelasi negatif kecil terhadap penurunan angka kemiskinan, sedangkan Alokasi Dana Desa berkorelasi negatif sangat kuat terhadap kemiskinan.

Analysis of Village Fund Governance and Village Fund Allocation, and Their Impact on Poverty Alleviation in Bogor District

ABSTRACT

National development seeks to improve people's welfare, one of which is seen from the poverty rate indicator. One of the government's priorities in reducing poverty in rural areas is the distribution of Village Funds since the issuance of the Law. No. 6 of 2014 concerning Villages. This Village Fund disbursement policy has been started since 2015 until now and many studies related to the effectiveness of Village Funds for poverty alleviation. An interesting empirical fact is that Bogor Regency is geographically very close to the State Capital, Jakarta, with the largest number of poor people in Indonesia at the district and city levels. The purpose of this study is to examine the impact of Village Funds on poverty rates in Bogor Regency, as well as the role of Village Government in poverty alleviation. With this approach it was found that for

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15218

Bogor Regency the Village Fund Variable had a small negative correlation to the reduction in the poverty rate, while the Village Fund Allocation had a very strong negative correlation to poverty.

PENDAHULUAN

Paradigma dalam tata kelola pemerintahan mengalami perubahan seiring dinamika dan tuntutan masyarakat. Dinamika yang muncul diwarnai dengan tuntutan perubahan peran dari para pemangku kepentingan dan lingkungan yang melingkupi interaksi yang terjadi. Perspektif yang berpusat pada government telah bergeser ke perspektif *governance*, dimana pergeseran yang terjadi ditandai pada perubahan fokus dan lokusnya. Tata Kelola pemerintahan akan selalu mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan tuntutan dinamika yang ada pada masyarakat demi kesejahtraan masyarakat melalui pembangunan.

Disisi lain, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diukur dengan indikator kemiskinan. Dalam penanggulangan kemiskinan, salah satu fokus pemerintah adalah penanggulangan kemiskinan di pedesaan yang memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan perkotaan, mengurangi disparitas desa kota. Salah satu pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan adalah Dana Desa. Tata Kelola merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam penyaluran dana desa yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Dana Desa sebagai wujud pengakuan pemerintah pusat terhadap Desa untuk bisa mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa dapat digunakan sebagai upaya peningkatan akses layanan publik di Desa, pengentasan kemiskinan, kesenjangan pembangunan antara Desa. Melalui UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana merupakan bagian dari transfer kekuasaan pengelola keuangan negara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Desa dalam rang mewujudkan masyarakay adil dan makmur.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pemberian transfer ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal, baik berupa ketidakseimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (ketidakseimbangan fiskal vertikal) dan ketidakseimbangan antar Pemerintahan Daerah (ketidakseimbangan fiskal horizontal). Dalam konteks desentralisasi fiskal di Tiongkok pada tahun 2003, terjadi ketidakseimbangan fiskal vertikal di mana Pemerintah Pusat menguasai pendapatan yang jauh lebih besar daripada tiga tingkat pemerintahan di wilayah tersebut, menurut Shen, Jin, dan Zhou (2006) dalam Rozani (2017) hal.3) dalam Munarsih dan Mulyadi (2011). Kebijakan pemberian transfer ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal, baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (*vertical fiscal balanced*) dan antar Pemerintah Daerah (*horizontal fiscal balanced*) dalam (Murniasih dan Mulyadi, 2011), Dalam konteks desentralisasi fiskal di China pada tahun 2003, terjadi ketidakseimbangan fiskal vertikal dimana Namun, beban belanjanya hampir sama dengan beban pemerintah daerah.

Dalam beberapa keadaan, terdapat ketidakseimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam hal pembiayaan, yang dapat menimbulkan disintegrasi dan perpecahan Pemerintah Pusat menguasai pendapatan yang jauh lebih besar daripada tiga tingkat pemerintahan di daerah, menurut Shen, Jin, dan Zhou (2006) dalam Rozani (2017). Transfer antar tingkat pemerintahan merupakan komponen penting dari suatu negara dengan

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15218

banyak lapisan pemerintahan dalam bentuk mekanisme perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Menurut Rozani (2017, hal. 2), ada dua alasan yang menyebabkan transfer dari pemerintah pusat ke daerah: pertama, ada mandat undang-undang yang menopang keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan kedua, ada argumen teoritis yang menghubungkan kewenangan memungut penerimaan negara.

Menurut undang-undang, tujuan utama dari Dana Desa. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk memperkuat pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan ekonomi desa, dan menjembatani kesenjangan pembangunan antar desa. Sejak tahun 2015 hingga 2021, sebanyak Rp 400,1 triliun dana desa telah disalurkan ke 74.957 desa di seluruh Indonesia (Ombusman: 2022). Mestinya, penyaluran Dana Desa sebanyak itu sejak tahun 2015 sampai saat ini sudah dapat mengurangi tingkat kemiskinan ke titik terendah di seluruh desa yang ada di Indonesia. Namun faktanya penurunan kemiskinan di tingkat desa jauh dari harapan pemerintah. Ini bisa diseabkan karena tata kelola yang kurang baik dan korupsi dana desa dari tahun ke tahun semakin meningkat. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) penyalahgunaan dana desa termasuk kasus korupsi tertinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi lainnya dan Kasus korupsi yang terjadi umumnya berlangsung pada desa-desa yang miskin dan terbelakang (ICW, 2023). Dan berdasarkan laporan dari Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) ada 686 Kepala Desa tersangkut korupsi dana desa (KPK, 2022). Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) soroti maraknya korupsi dana desa di desa wilayah Indonesia. Korupsi Dana Desa juga banyak menyeret kepala-kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor, ironi sekali dengan status Kabupaten terbanyak jumlah masyarakat miskinnya pemerintahan desanya banyak terlibat kasus korupsi Dana Desa.

Korupsi di Indonesia sampai ke tingkat desa terjadi karena budaya korupsi yang sudah mengakar Sindu (2013), korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Adnan Buyung Nasution dkk, 1999: 20). Korupsi dapat merusak tata kelola pemerintahan yang baik (KPK, 2023), korupsi di birokrasi pemerintahan berdampak negatif bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan ketidakadilan dan keberpihakan yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum dan penyedia layanan publik. Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good gobernance good government*) dijalankan di atas prinsip-prisip: *Partisipasi, Representasi, Penyelenggaraan Pemilu yang Adil, Daya tanggap, Efisiensi dan Efektivitas, Keterbukaan dan Transparansi, Supremasi Hukum, Perilaku Etis, Kompetensi dan Kapasitas, Inovasi dan Keterbukaan terhadap Perubahan, Keberlanjutan dan Orientasi Jangka Panjang, Manajemen Keuangan yang Baik, Hak Asasi Manusia, Keanekaragaman Budayadan Kohesi Sosial, dan Akuntabilitas* (UNDP).

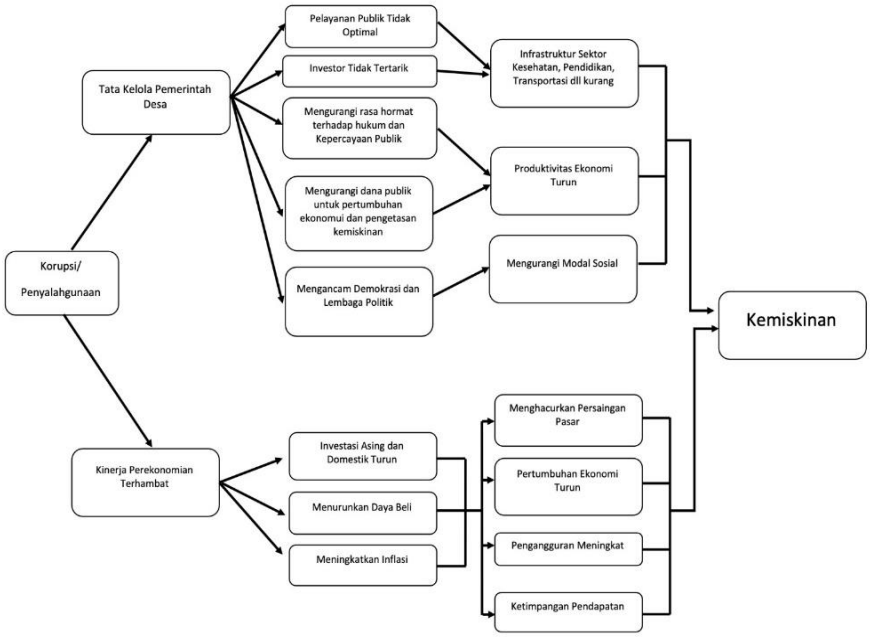
Namun, berbagai faktor berkontribusi terhadap buruknya tata kelola dana desa antara lain:

1. Masalah regulasi di desa
2. Hampir semua masyarakat tidak mampu melakukan prosedur pembukuan yang baik.
3. Rendahnya kualitas kantor pemda, yang menyebabkan buruknya administrasi pelaporan.
4. Karena Dana Desa rendah pengawasan dan pengendaliannya, maka rentan disalahgunakan.

Pada tingkat implementasi, tindakan orupsi dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan dari pusat sampai ke desa, mengganggu program kerja dan kinerja perekonomian. Puncaknya tindakan korupsi dapat menjadi penyeba utama kemiskinan sulit

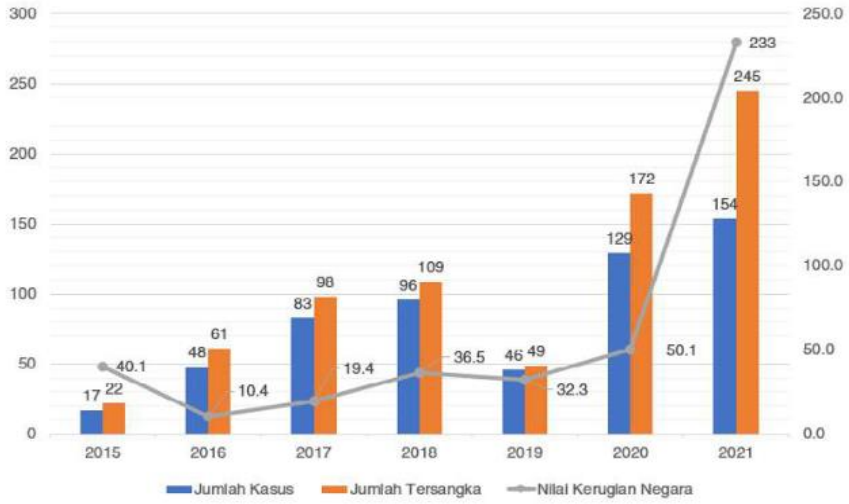
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15218

ditanggulangi karena dana pembanbangunan yang dialokasikan untuk masyarakat dinikmati oleh segelintir orang. Gambar 1 dibawah ini dapat dilihat alur bagaimana korupsi berujung pada kemiskinan.



Sumber : Chetwynd, Johnston, Gupta et all (2000), Ondo (2017)
Gambar 1. Relasi antara Korupsi dan Kemiskinan

Korupsi melemahkan proses tata kelola, lembaga tata kelola, dan penyampaian layanan pemerintah, nerusak demokrasi dan pemerintaha (Johnson, 2000), menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Gubta, 2000), Berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dan meningkatkan kemiskinan (Ondo, 2017).



Gambar 2. Trend Peningkatan Kasus Korupsi Dana Desa 2015-2021 (ICW, 2022)

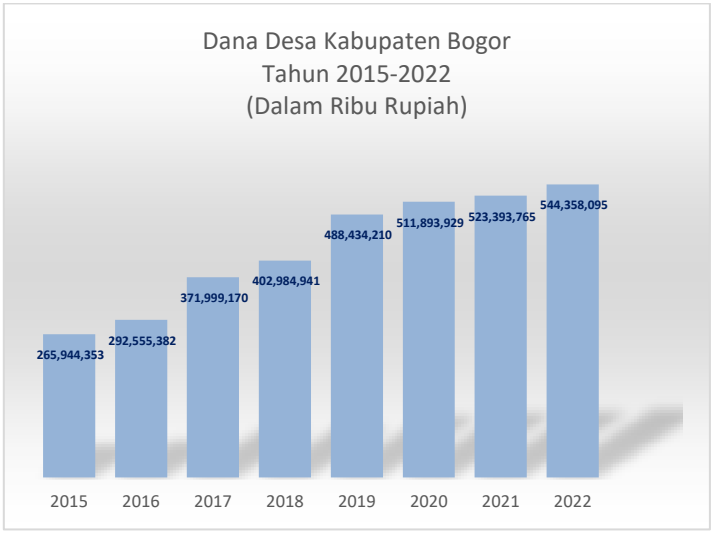
Sejak tahun 2015, statistiknya korupsi Dana Desa smeninecara gkat drastis baik dari segi jumlah kasus, jumlah tersangka, maupun nilai kerugian keuangan negara. Temuan ini sangat memprihatinkan mengingat total pagu anggaran Dana Desa pada tahun 2021 relatif

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15218

besar, yakni Rp 72 triliun yang akan dibagi ke 74.961 desa. 12 Akibatnya, diasumsikan bahwa setiap desa akan menerima sekitar Rp 1 miliar. Pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa akan gagal jika tata kelola tidak diperbaiki baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Sejak bergulirnya Dana Desa, korupsi yang dilakukan oleh aparat desa hampir menyeluruh terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor.

Jumlah Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Bogorpada tahun 2022 mencapai Rp.544 Milyar. Jumlah yang tidak sedikit dibandingkan Kabupaten lainnya. Sejak tahun 2015, dana desa di Kabupaten Bogor mengalami kenaikan yang cukup signifikan (lihat Gambar 3).



Gambar 3. Penerimaan Dana Desa Kabupaten Bogor Tahun 2012-2022

Sedangkan Alokasi Dana Desa dari data yang diterima oleh desa-desa di Kabupaten Bogor dapat dibilang tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015 – 2022 yang dapat dilihat dari gambar 4.

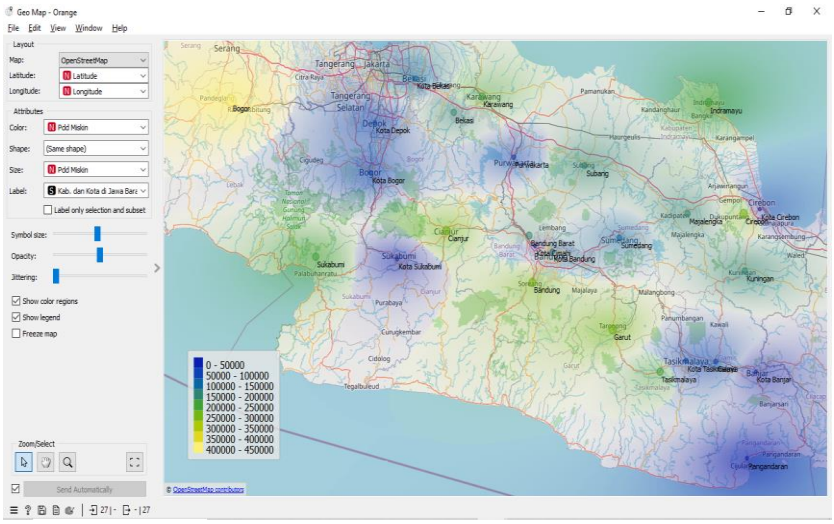


Gambar 4. Penerimaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bogor Tahun 2015-2022

Total Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Kabupaten Bogor sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 sebanyak Rp 1,805 Trilyun, jumlah dana paling banyak yang

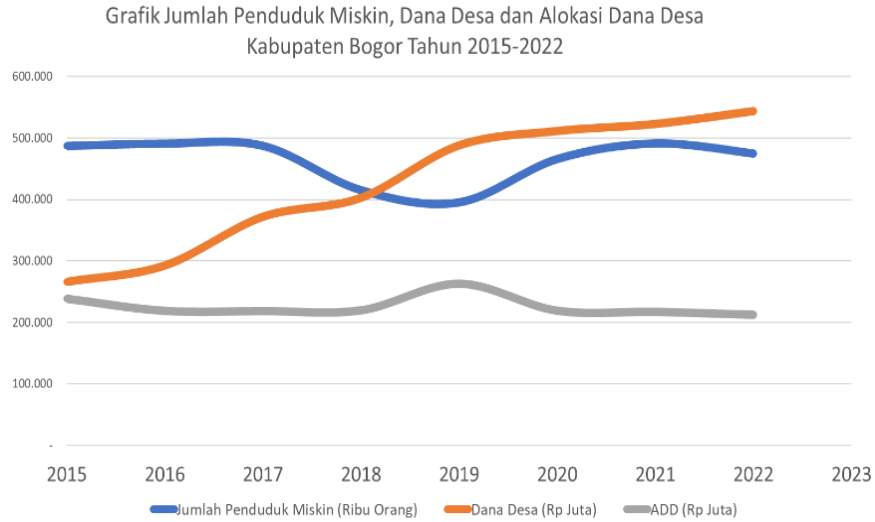
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15218

diterima oleh kabupaten dibandingkan dengan kabupaten lain di seluruh Indonesia. Besarnya Alokasi Dana Desa ini mestinya dapat menurunkan angka kemiskinan yang lebih signifikan untuk Kabupaten Bogor.



Gambar 5. Sebaran Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat

Pada Gambar 5 di atas menunjukkan sebaran penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, dimana dapat dilihat sebara tertinggi ada di Kabupaten Bogor dengan identitas sebaran warna kuning. Jumlah penduduk miskin sebanyak 474.740 jiwa pada tahun 2022 (BPS Dalam Angka, 2023) tertinggi di Jawa Barat dan Indonesia.



Gambar 6. Jumlah Penduduk Miskin, Dana Desa dan Alokasi Kabupaten Bogor Tahun 2015-2022

Sejak tahun 2015-2022 baik Dana Desa (DD) maupun alokasi Dana Desa trend peningkatan terjadi dari tahun ke tahun. Namun penurunan angka kemiskinan tidak mengikuti trend dana transfer yang diterima oleh Kabupaten Bogor. (lihat Gambar 6).

METODE

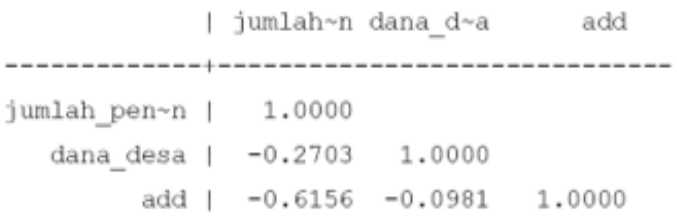
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15218

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan mengukur korelasi antara dana desa dan alokasi dana desa terhadap penanggulangan kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2015-2022 (Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Bogor). Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006). Pengolahan Data korelasi antar variabel menggunakan Aplikasi STATA. Aplikasi Stata ini memungkinkan untuk mengolah data dengan berbagai bentuk data. pengolahan data panel terdapat dua bentuk data *wide* data dan *time series* data. Dalam penelitian ini variael Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dijasikan sebagai variabel beas dan angka kemiskinan sebagai variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada latar belakang serta tujuan penelitian, secara skematis kerangka penelitian diatas, dapat kita duga bahwa dana desa dan alokasi dana desa mempengaruhi jumlah kemiskinan. Penelitian ini dilakukan dengan pengembangan hipotesis secara umum diduga Dana Desa, Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan dengan hipotesis secara parsialnya sebagai berikut:

H1 : Diduga Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.
H2 : Diduga Alokasi Dana berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.



	jumlah~n	dana_d~a	add
jumlah_pen~n	1.0000		
dana_desa	-0.2703	1.0000	
add	-0.6156	-0.0981	1.0000

Gambar 7. Hasil Pengolahan Dana Desa dengan menggunakan STATA

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15218

```
. jumlah_penduduk_miskin dana_desa
command jumlah_penduduk_miskin is unrecognized
r(199);
| jumlah~n dana_d~a
-------------+------------------

jumlah_pen~n |   1.0000
   dana_desa |  -0.2703   1.0000
             | jumlah~n dana_d~a      add
-------------+---------------------------
jumlah_pen~n |   1.0000
   dana_desa |  -0.2703   1.0000
         add |  -0.6156  -0.0981   1.0000
```

Gambar 8. Hasil Pengolahan Dana Desa dengan menggunakan STATA

Dana desa dan alokasi dana desa merupakan katalisator yang diharpakan secara signifikan mengurangi kemisikan secara cepat dan efektif. Dari nilai koefisien korelasi terlihat bahwa Dana desa dan alokasi dana desa berkorelasi dengan kemiskinan. Artinya ketika terjadi peningkatan dana desa dan alokasi dana desa terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Koefisien korelasi dana desa dengan kemiskinan sebesar -0,2703, artinya antara dana desa berkorelasi negatif lemah dengan kemiskinan. Koefisien korelasi alokasi dana desa dengan kemiskinan sebesar -0.6156, artinya antara dana desa berkorelasi negatif kuat dengan kemiskinan.

Tabel 1. Korelasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2022

Variabel	Koefisien Koralasi	Keterangan
Dana Desa	-0,2703	Korelasi Negatif Lemah
Alokasi Dana Desa	-0,6156	Korelasi Negatif Kuat

Sumber: Data diolah, 2023.

SIMPULAN

Diperlukan Tata Kelola dana desa dan alokasi dana desa dalam penyaluran dan pemanfaatan dana desa pada program-program *pro poor, pro growth, pro job* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hasil pengolahan ditemukan bahwa Dana desa dan Alokasi dana desa di Kabupaten Bogor dari tahun 2015-2022 berkorelasi negative terhadap jumlah kemiskinan, artinya jika dana desa meningkat maka jumlah kemiskinan menurun. Praktek korupsi dana desa menghambat penanggulangan kemiskinan, diperlukan pengawasan yang ketat dari stakeholder desa dan penguatan *low enforcement* (penegakan hukum). Tata kelola yang baik dapat mengindari perilaku koruptif aparat desa demi terwujudnya penurunan angka kemiskinan, meningkatnya indeks pembangunan manusia di tingkat desa, mengurangi angkat penganguran, dan kesenjangan antar desa.

REFERENSI

Alfirdaus, Laila Kholid. Et al. (2020). Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengefektifkan Dana Desa. Jurnal Pengabdian Vokasi, Vol. 01, No. 04, Nopember 2020

Arikunto, S. (2006 :130). Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Jakarta: Rineka Cipta.

Cheema, G. Shabir. 2005. Building Democratic Institutions: Governance Reform in Developing Countries. USA: Kumarian Press Inc.

Collier, David and Steven Levitisky. 1997. Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research in World Politics Journal, Vol. 49, No. 3

Faradila, Dita. (2022). Analisis Perbedaan Kondisi Ketimpangan Dan Kemiskinan Desa kota Sebelum Dan Sesudah Digulirkannya Dana Desa.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Fauzi, A. (2017). Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik , 5 (1), 23-40

Ghozali, R., & Hari, K. K. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Govermance (Studi Kasus Pada 19 Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat). 2(2), 237-243

Handra, Hefrizal. (2022). Analisis Kebijakan Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan, Perekonomian, Pengangguran, Dan Pelayanan Publik Periode 2015-2019. Kompak. Jakarta

Mustofa, Syahrul. (2020). Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa Dari Sabang Sampai Marauke. Gupedia Publishing. Bogor

Safitri, Sherin. (2020). Pengaruh Korupsi terhadap Kemiskinan: Analisis Data 75 Negara. IPB University. Bogor

Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5 (2), 105-119.

Sinda, Viola (2013). Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih, Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus.

Nasution, Adnan Buyung, dkk. (1999). Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, Yogyakarta: Aditya Media.

Ombusman (2022). Mengawasi Dana Desa https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--mengawasi-dana-desa

Johnston, Michael. 2000. Corruption and Democracy: Threats to Development, Opportunities for Reform."Paper Prepared for Departement of Political Science, Colgate Universiy.

Ondo A. 2017. Corruption and Economic Growth: The Case of EMCCA. Theoretical Economics Letters. 7(2017):1292-1305

Gupta S, Davoodi H, Terme RA. 2000. Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty. IMF Working Paper. 98(76): 1-41.

Chetwynd E, Chetwynd F, Spector B. 2003. Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature. Management System International, Final Report, Washington, DC. hlm 1-21.